

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Enemy Nations* atau *Enemy States Clauses* merupakan sebuah konsep yang tercantum dalam Piagam PBB mengenai negara yang kalah dalam Perang Dunia II yakni Jepang, Jerman dan Italia.<sup>1</sup> Dapat dikatakan negara-negara yang menyandang status ini dianggap sebagai sebuah penjajah yang kejam pada era Perang Dunia II seperti halnya yang dilakukan oleh Jepang dengan kekuatan militernya yang sangat kuat pada saat itu digunakan untuk menguasai negara lain. Salah satu contoh yang membekas adalah mengenai wanita yang dijadikan sebagai pemuas nafsu para tentara militer Jepang.

Negara yang menyandang predikat sebagai *Enemy States* ini tentunya dapat diserang tanpa adanya deklarasi perang terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa dengan masih adanya status sebagai sebuah negara yang masih mendapatkan predikat *enemy* ini dapat mengganggu kedamaian di Asia maupun Eropa.

---

<sup>1</sup> Terry Mccarthy, 1992, “*Japan Fights to Lose UN ‘Enemy’ Tag*”, diakses dalam <http://www.independent.co.uk/news/world/japan-fights-to-lose-un-enemy-tag-1553305.html> (16/3/2017, 14.00 WIB)

Banyak hal yang melatarbelakangi mengapa Jepang mendapatkan predikat sebagai *Enemy States* ini. Hal ini dapat dilihat dari sejarah masa lalu dari Jepang dan beberapa negara anggota tetap dari PBB itu sendiri. Jepang seringkali mengajukan diri menjadi anggota tetap DK PBB namun pada akhirnya Jepang selalu menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni pada tahun 1958-1959, tahun 1966-1967, tahun 1971-1972, tahun 1975-1976, tahun 1981-1982, tahun 1987-1988, tahun 1992-1993, tahun 1997-1998, tahun 2005-2006, tahun 2009-2010, dan pada tahun 2016-2017.<sup>2</sup>

Keinginan Jepang yang sangat gigih agar dapat bergabung dengan keanggotaan DK PBB ini dilandasi oleh keinginannya untuk dapat turut serta dalam perpolitikan internasional yakni menjaga perdamaian internasional.<sup>3</sup> Status *Enemy State* yang disandang oleh Jepang saat ini membuat Jepang sulit untuk turut serta dalam menjaga perdamaian internasional terutama mengenai aktivitas militer yang cenderung dibatasi pergerakannya. Salah satu alasan mengapa Jepang selalu gagal menjadi anggota tetap DK PBB adalah dikarenakan agresi militer Jepang pada Perang Dunia II yang mana

---

<sup>2</sup> United Nations Security Council, *Search Membership by Country*, diakses dalam [http://www.un.org/en/sc/inc/searchres\\_sc\\_members\\_english.asp?sc\\_members=191](http://www.un.org/en/sc/inc/searchres_sc_members_english.asp?sc_members=191) (21/4/2018, 03:45 WIB)

<sup>3</sup> Ministry of Foreign Affairs, *An Argument for Japan's Becoming Permanent Member*, diakses dalam [http://www.mofa.go.jp/policy/q\\_a/faq5.html](http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq5.html) (21/4/2018, 03:46 WIB)

memberikan penderitaan yang sangat besar bagi penduduk Tiongkok, Asia dan dunia pada umumnya.<sup>4</sup>

Pernyataan mengenai *Enemy State* ini tercantum pada artikel 53 dan 107 dalam piagam PBB. Pada artikel 53 berbunyi:

*“1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any Enemy State, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements direct against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with responsibility for preventing further aggression by such a state.  
2. The term Enemy State as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.”<sup>5</sup>*

Artikel 107 dalam piagam PBB berbunyi:

*“Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action”.<sup>6</sup>*

Dikarenakan adanya artikel ini dalam piagam PBB menyebabkan Jepang dan beberapa negara mendapatkan dampaknya yakni sulit dalam hal

---

<sup>4</sup> The Michigan Daily, *China Opposes Japan's Bid for Security Council*, diakses dalam <https://www.michigandaily.com/content/china-opposes-japans-bid-security-council> (21/4/2018, 04:19 WIB)

<sup>5</sup> United Nations, *Chapter VIII*, diakses dalam <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-viii/index.html> (16/3/2017, 14.10 WIB)

<sup>6</sup> United Nations, *Chapter XVII*, diakses dalam <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xvii-0/index.html> (16/3/2017, 14.14 WIB)

bergabung menjadi anggota tetap dalam keanggotaan DK PBB. Secara tidak langsung pula, Jepang harus semakin melakukan antisipasi jika ada serangan mendadak dari pihak asing. Seperti yang telah diketahui bahwa Jepang tidak diperbolehkan untuk memiliki pasukan militer sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Jepang berusaha untuk melakukan amandemen artikel 9 yang dilakukan oleh PM Shinzo Abe ketika menjabat pada tahun 2007 dan tentunya keinginannya untuk mengamandemen artikel 9 ini membuat negara lain gusar.<sup>7</sup> Pada 3 Mei 2017, PM Shinzo Abe pertama kalinya mengutarakan niatnya mengenai perubahan dalam konstitusi Jepang yakni mengenai artikel 9.<sup>8</sup> Artikel 9 Konstitusi Jepang ini berbunyi:

*“Aspiring sincerely to an International peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means off settling international diputes. In order to accomplish the aim the proceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”<sup>9</sup>*

Permasalahan tentang sulitnya menghapus predikat sebagai *Enemy State* ini membuat Jepang berusaha berpikir keras bagaimana agar dapat

---

<sup>7</sup> Wendy Andhika, *Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol, 2 No, 1 (April 2013), Depok: Center For East Asian Cooperations Studies Universitas Indonesia, hal. 2, diakses dalam <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/296/345> (1/4/2018, 05:09 WIB)

<sup>8</sup> Mainichi Japan, *Editorial: Abe Belittling Diet Over Constitutional Reform, School Land Scandal*, diakses dalam <https://mainichi.jp/english/articles/20170509/p2a/00m/0na/017000c> (19/4/2018, 23:18 WIB)

<sup>9</sup> Prime Minister of Japan and His Cabinet, *The Constitution of Japan*, diakses dalam [https://japan.kantei.go.jp/constitution\\_and\\_government\\_of\\_japan/constitution\\_e.html](https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html) (19/4/2018, 23:18 WIB)

menghapus konsep *Enemy State* yang terdapat dalam Piagam PBB. Dengan terhapusnya konsep *Enemy State*, Jepang dapat dengan mudah dalam mewujudkan *national interestnya* ketika telah menjadi anggota tetap DK PBB.

Semenjak Jepang bergabung dalam keanggotaan tidak tetap DK PBB, Jepang turut serta aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di dunia. Pada tahun 1976, Jepang bergabung dalam keanggotaan G8 yakni kelompok industri negara maju yang mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas isu-isu global seperti pertumbuhan ekonomi dan krisis manajemen, keamanan global, energi dan terorisme.<sup>10</sup> Selain Jepang yang turut serta dalam memerangi permasalahan terorisme, Jepang turut serta dalam membantu dalam perekonomian dunia, Jepang juga memberikan bantuan yang dinamakan sebagai ODA (*Official Development Assistance*) yakni bantuan dana dan teknik dari Jepang dan diberikan kepada negara berkembang yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial ekonomi.<sup>11</sup> Selain itu, Jepang juga mendirikan JF (*Japan Foundation*) yakni sebuah institusi yang didedikasikan sebagai lembaga yang mana memiliki program untuk mengenalkan budaya Jepang ke dunia luar.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Council on Foreign Relations, *The Group of Eight (G8) Industrialized Nations*, diakses dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/group-eight-g8-industrialized-nations> (20/4/2018, 17:13 WIB)

<sup>11</sup> Japan Official Development Assistance, *Sistim Bantuan ODA Jepang di Indonesia*, diakses dalam [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda\\_01.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm) (16/3/2017, 14.30 WIB)

<sup>12</sup> Japan Foundation, *About Us*, diakses dalam <http://www.jpf.go.jp/e/about/index.html> (16/3/2017, 14:42 WIB)

Dalam mewujudkan hal ini aktor yang berperan penting dalam membuat langkah untuk menjadikan Jepang sebagai negara normal yang cinta damai yakni PM Jepang. PM melakukan berbagai upaya agar *enemy tag* dalam piagam PBB ini dapat segera direvisi. Sebagaimana contohnya seperti PM Nobusuke Kishi yang menjabat pada periode 1957-1960 yang pernah mencoba untuk merevisi konstitusi Jepang mengenai *U.S-Japan Security Pact* pada tahun 1950an namun usahanya gagal karena parlemen menganggap hal tersebut terlalu militeristik.<sup>13</sup> PM Junichiro Koizumi yang menjabat pada tahun 2001-2006 juga mengutarakan niatnya untuk menghapus *Enemy State clause* yang mana sudah tidak sesuai dengan abad ke-20.<sup>14</sup>

Perdana Menteri yang menjabat ini melakukan pembenahan-pembenahan agar Jepang dapat dianggap sebagai negara yang normal dan tidak ditakuti seperti yang terjadi ketika Jepang memiliki kekuatan militer yang kuat pada Perang Dunia II. Jepang berusaha memperbaiki hubungan dengan berbagai negara termasuk kepada negara yang telah diinvasi oleh Jepang pada masa pendudukannya. Jepang berusaha menghapuskan sentimen negatif anti-Jepang terutama pada negara-negara yang berada di wilayah Asia Timur.

---

<sup>13</sup> Japan Times, *Japan's Fading Pacifism Leaves Japanese Worried*, diakses dalam <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/07/22/commentary/japan-commentary/japans-fading-pacifism-leaves-japanese-worried/#.WvMtHoiFPIU> (21/4/2018, 00:04 WIB)

<sup>14</sup> Prime Minister of Japan and His Cabinet, *Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi at the 57<sup>th</sup> Session of General Assembly of the United Nations*, diakses dalam [http://japan.kantei.go.jp/koizumispeech/2002/09/13speech\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/koizumispeech/2002/09/13speech_e.html) (21/4/2018, 00:27 WIB)

Melihat problematika diatas, maka penulis berusaha untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Jepang dalam mengkonstruksi *image* Jepang yang dianggap sebagai sebuah *Enemy State* sejak Perang Dunia II telah berakhir yang mana hal tersebut sudah tidak relevan lagi jika diterapkan pada era modern saat ini mengingat Jepang saat ini sudah tidak menggunakan kekuatan militernya seperti ketika Jepang masih berkuasa dan kuat dalam hal kemiliteran. Melihat Jepang yang sudah tidak menggunakan kekuatan militernya seperti ketika masih berkuasa dan menjadi sebuah negara yang ditakuti tentu hal ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan masalah : “Bagaimana Jepang memperbaiki *imagemya* sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Jepang memperbaiki *imagemya* sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi perluasan kajian dan pemenuhan referensi bagi keilmuan bagi studi Hubungan Internasional serta bagi kajian politik dan pemerintahan.

#### b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman mengenai “Konsruksi *Image* Jepang Bukan sebagai *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan”. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan kerangka berpikir bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan konteks penelitian.

### 1.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai “Konsruksi *Image* Jepang Bukan sebagai *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan”, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yang mana kepentingan nasional mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Jepang. *Pertama*, oleh Duong Thi Thu yang berjudul “*Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in Vietnam-A Case Study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program*”.<sup>15</sup> Penelitian ini menekankan *soft*

---

<sup>15</sup> Duong Thi Thu, 2013, *Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in Vietnam-A Case Study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program*, Thesis, New Zealand: Master of International Relations, University of Wellington



*power* Jepang melalui program *Southeast Asian Youth Exchange* di Vietnam yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peserta maupun bukan peserta program memiliki pandangan lebih positif mengenai Jepang. Vietnam dapat dipertimbangkan sebagai sebuah negara yang mana memiliki kekuatan utama di Asia Tenggara mengingat Vietnam memiliki populasi penduduk sebanyak 90 juta dan juga Vietnam merupakan salah satu negara yang termasuk *emerging economy*. Selain itu, Jepang juga memiliki kepentingan untuk dapat bergabung menjadi anggota tetap DK PBB yang mana Jepang membutuhkan dukungan dari 10 anggota negara ASEAN. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwasannya *public diplomacy* Jepang di Vietnam berhasil yang mana Jepang melakukan usaha yang sangat besar terutama melalui program pertukaran pemuda. Peserta *Southeast Asian Youth Exchange Program* ataupun bukan peserta program memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap Jepang dan juga mendukung Jepang baik secara ekonomi maupun politik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan *soft power* di negara yang pernah mengalami kolonialisasi Jepang seperti Korea, Tiongkok dan juga Indonesia yang mana *soft power* Jepang disini yang dilakukan melalui *Official Development Assistance*, *Japan Foundation*, dan juga *abonomic*. Melalui *soft power* yang Jepang lakukan di era PM Shinzo Abe menjabat, peneliti ingin mengetahui apa saja yang PM Shinzo Abe lakukan dalam mengkonstruksi *image* Jepang sebagai negara bukan *Enemy State*..

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yusy Widarahesty yang berjudul “*Alasan Jepang untuk Menjadi Anggota Tetap DK PBB (Studi tentang Diplomasi Internasional Jepang Pasca Perang Dunia Ke-II)*”<sup>16</sup>. Pada penelitian ini, menekankan pada keinginan Jepang terhadap perubahan pada tubuh PBB. Jepang beranggapan bahwa dalam Piagam PBB terdapat pasal-pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dunia saat ini dikarenakan ada beberapa pasal yang lahir pada Perang Dunia II. Diplomasi yang dilakukan oleh Jepang merupakan salah satu caranya untuk memperkuat peranan Jepang di dunia Internasional yang mana dapat dilihat dari kebijakannya tentang pilar kembar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan Negara Jepang dengan negara di kawasan Asia untuk masuk menjadi kelompok anggota negara demokrasi maju seperti Amerika dan Eropa.

Jepang berusaha untuk membuktikan tanggungjawabnya sebagai negara perekonomian maju yang mana melalui ODA dan PKO Jepang berusaha pula memberikan kontribusinya di PBB. Dengan berbagai upayanya, Jepang berharap posisinya dapat dipertimbangkan agar dapat menjadi anggota tetap DK PBB.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan disini menekankan pada *official development assistance* di negara

---

<sup>16</sup> Yusy Widarahesty, 2008, *Alasan Jepang untuk Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (Studi tentang Diplomasi Internasional Jepang Pasca Perang Dunia Ke-II)*, Tesis, Depok: Program Studi Kajian Wilayah Jepang, Universitas Indonesia

Korea Selatan dan Tiongkok yang pernah dikolonialisasi oleh Jepang. Selain itu dalam *hard power* yang dilakukan oleh Jepang disini melalui proaktif pasifisme dan revisi artikel 9 yang mana hal ini dilakukan di era PM Shinzo Abe.

*Ketiga*, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Toshiya Nakamura yang berjudul “*Japan’s New Public Diplomacy: Coolness in Foreign Policy Objectives*”.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya tujuan jangka panjang dari kebijakan Jepang adalah untuk dapat bergabung dalam komunitas internasional yang mana ditujukan melalui *public diplomacy manga*, anime dan hal ini yang memiliki kualitas yang menarik. Karakter Doraemon pun juga menjadi sebuah *ambassador* yang mempromosikan kebudayaan dari Jepang. Disini, Jepang berusaha mengkonstruksi *image* melalui kebudayaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan disini konstruksi *image* yang dilakukan Jepang melalui *students and youth exchange program* yang mana para pemuda dan pelajar yang telah berkunjung ke Jepang dapat menceritakan pengalaman mereka mengenai Jepang. Hal ini dapat mengkonstruksi kebanyakan mengenai Jepang dan

---

<sup>17</sup> Toshiya Nakamura, *Japan’s New Public Diplomacy : Coolness in Foreign Policy Objectives*, University of Nagoya, paper presented to the International Studies Association Annual Convention San Diego, US (April 2, 2012)-Asia Pacific Regional Section, Brisbane, Australia (September 29, 2011), diakses dalam <https://www.lang.nagoya-u.ac.jp/media/public/mediasociety/vol5/pdf/nakamura.pdf> (28/4/2018, 20:57 WIB)

memungkinkan munculnya ketertarikan mengenai kebudayaan Jepang lebih mendalam.

*Keempat*, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Seunghoon Emilia Heo dalam “*Reconciling Enemy States in Europe and Asia*” yang diterbitkan pada tahun 2012.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian dapat didapatkan melalui 3 level. Level pertama yakni level internasional dan sistemik sebagaimana contohnya adalah tekanan eksternal pada rekonsiliasi bilateral. Level kedua yakni level regional yang mana mengenai kerjasama regional dan kerangka kelembagaan khususnya dalam proses integrasi nasional. Level ketiga yakni level domestik yang mana berkaitan dengan hubungan bilateral antara negara. Di dalam buku ini, ditunjukkan mengenai cara mendapatkan perdamaian yang mana pada akhir Perang Dunia apakah masih ada kebencian diantara negara-negara yang bahkan tidak merasakan kolonialisme Jepang.

Perdamaian memang tidak bisa diaplikasikan pada setiap kasus. Jika muncul sebuah pernyataan mengenai menghancurkan sebuah ketegangan mungkin saja sudah mengarah dari tujuan akhir dari perdamaian tersebut.

Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang peneliti lakukan menekankan bahwasannya dengan mendapatkan perdamaian sebagai *Enemy State* yang dirasakan oleh Jepang adalah dengan dapat

---

<sup>18</sup> Seunghoon Emilia Heo. 2012. *Reconciling Enemy States in Europe and Asia*. Japan: Palgrave Macmillan

menggunakan kekuatan militer secara mandiri sebagaimana seperti negara-negara lain lakukan. Dengan dapat menggunakan kekuatan militer secara mandiri, maka Jepang dapat menjadi sebuah negara yang normal.

*Kelima*, penelitian berikutnya dilakukan oleh Li Li berjudul “*Construction of China’s National Image through Translation: Problems and Solution*.”<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini yakni bahwasannya seorang penerjemah memiliki peranan dalam membentuk sebuah citra sebuah negara. Seorang penerjemah dapat menerjemahkan sebuah teks yang mana memuat informasi mengenai Tiongkok. Sehingga media disini dapat dikatakan berperan penting dalam pembentukan citra sebuah negara.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan aktor yang digunakan adalah PM Shinzo Abe selaku yang mampu membentuk citra sebuah negara menjadi lebih baik. Walaupun media juga turut serta dalam membentuk citra yang dibentuk oleh PM Shinzo Abe, namun yang berperan penting dalam peneliti lakukan adalah PM Shinzo Abe.

*Keenam*, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chadijah Isfariani Iqbal berjudul “*Budaya Populer Pokemon Go sebagai Soft Diplomacy Jepang*”.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini adalah *pokemon go* merupakan *game* populer yang

---

<sup>19</sup> Li Li, *Construction of China’s National Image through Translation: Problems and Solution*, Journal of Intercultural Communication Studies, Vol, XXV, No, 3 (2016), China: Macao Polytechnic Institute, diakses dalam

<https://web.uri.edu/iaics/files/Li-LI.pdf> (28/4/2018, 20:03 WIB)

<sup>20</sup> Chadijah Isfariani Iqbal, *Budaya Populer Pokemon Go sebagai Soft Diplomacy Jepang*, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Jepang, Vol, 5, No, 2 (Maret 2017), Makassar: Universitas Hasanuddin, diakses dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/izumi/article/view/12144/10158> (29/4/2018, 22:49 WIB)

telah memasuki Indonesia yang mana menyebabkan para pengguna *smartphone* lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari pokemon. Dengan adanya budaya populer maka dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional mengenai kebudayaan dan negaranya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti yang peneliti lakukan disini menunjukkan budaya populer lainnya mengenai Jepang yang dapat menciptakan *image* positif mengenai Jepang adalah adanya pembelajaran bahasa Jepang. Bahasa Jepang dapat dikatakan telah menarik minat pelajar ataupun pemuda mengenai budaya serta bahasa Jepang. Dengan adanya pembelajaran bahasa Jepang, tentunya pelajar dan pemuda akan lebih memahami bagaimana kebudayaan dari Jepang serta dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Jepang tanpa adanya kesalahpahaman.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang peneliti lakukan disini lebih menekankan bagaimana Jepang memandang dirinya sebagai *Enemy State*, bagaimana upaya PM Shinzo Abe mengkonstruksi *image* Jepang baik melalui *hard power* (revisi artikel 9, proaktif pasifisme) dan juga melalui *soft power* (*official development assistance, Japan foundation, abenomic*) sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan.

#### **Tabel 1 Posisi Penelitian**

No	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	<p>Tesis: Japan's Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in Vietnam-A Case Study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program</p> <p>Oleh: Duong Thi Thu</p>	<p>Inductive Method</p> <p>Pendekatan: Public Diplomacy</p>	<p>- <i>Public diplomacy</i> berhasil dilakukan oleh Jepang. Hal ini terbukti dengan peserta <i>Southeast Asian Youth Exchange Program</i> ataupun bukan peserta mendukung Jepang untuk menjadi lebih baik. Program pertukaran yang dilakukan oleh Jepang ini menyebabkan minat dan antusias yang tinggi masyarakat dunia untuk mengenal lebih dalam mengenai Jepang</p>
2	<p>Tesis : Alasan Jepang untuk Menjadi Anggota Tetap DK PBB (Studi tentang Diplomasi Internasional Jepang Pasca Perang Dunia ke-II)</p> <p>Oleh: Yusy Widarahesty</p>	<p>Studi Pustaka</p> <p>Deskripsi Analisis</p> <p>Pendekatan: Teori Politik Luar Negeri Teori Diplomasi</p>	<p>- Jepang ingin memperkuat peranannya di dunia Internasional dan kedudukan yang sama</p> <p>- Menerapkan kebijakan pilar kembar dalam PBB</p> <p>- ODA dan PKO merupakan bentuk diplomasi konsolidasi damai</p>
3	<p>Paper : Japan's New Public Diplomacy: Coolness in Foreign Policy Objectives</p> <p>Oleh: Toshiya Nakamura</p>		<p>- Doraemon dijadikan sebuah <i>brand ambassador</i> yang dapat mempromosikan kebudayaan Jepang serta menunjukkan bagaimana kemajuan dari teknologi Jepang. <i>Public diplomacy</i> yang dilakukan oleh Jepang</p>

			ini dapat dikatakan berhasil karena karakter Doraemon dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional.
4	<p>Buku : <i>Reconciling Enemy States in Europe and Asia</i></p> <p>Oleh: Seunghoon Emilia Heo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdamaian merupakan hal yang didambakan oleh setiap Negara. Walaupun pada kenyataannya, perdamaian memang tidak selalu bisa diaplikasikan pada setiap kasus, namun mungkin saja dengan menghilangkan ketegangan yang terjadi di Negara yang sedang bertikai, tujuan dari perdamaian akan tercapai.</li> </ul>
5	<p>Jurnal: Construction of China's National <i>Image</i> through Translator, Problems and Solution</p> <p>Intercultural Communication Studies Volume XXV, Nomor 3 (2016)</p> <p>Oleh: Li Li</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seorang penerjemah dapat melakukan penerjemahan terhadap teks atau hal lainnya yang mana tergantung apa yang akan diterjemahkan. Penerjemah menerjemahkan tergantung dengan apa yang ingin diketahui pembaca mengenai Tiongkok. Penerjemah dapat memilah sumber-sumber yang berkaitan dengan Tiongkok baik atau buruk sehingga pembaca dapat mengetahui Tiongkok dari produk yang telah</li> </ul>



			diterjemahkan oleh penerjemah
6	<p>Jurnal: Budaya Populer Pokemon Go sebagai Soft Diplomacy Jepang</p> <p>Bahasa, Sastra, dan Budaya Jepang, Volume 5, No, 2 (Maret 2017)</p> <p>Oleh: Chadijah Isfariani Iqbal</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan budaya populer seperti Pokemon GO sebagai Soft diplomacy bertujuan agar Jepang dapat membangun citra positifnya di dunia internasional yang diperlukan untuk dapat membangun kerja sama yang baik dengan Negara lain. Selain itu, melalui budaya populer yang digunakan sebagai soft diplomacy, Jepang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai masyarakat, kebudayaan dan Negaranya kepada masyarakat internasional, yang dapat menghindari kesalah pahaman terhadap Jepang</li> <li>- Pengembangan budaya populer sebagai soft power dan soft diplomacy juga merupakan pengembangan dari alat diplomasi yang dapat digunakan Jepang dalam menjalankan politik luar negerinya dalam hubungan kerjasama internasionalnya.</li> </ul>

7	<p>Konstruksi <i>Image</i> Jepang sebagai Negara bukan <i>Enemy States</i>.</p> <p>Oleh: Mifta Aulia Syahrhani</p>	<p>Studi Pustaka</p> <p>Eksplanatif</p> <p>Pendekatan:</p> <p>Konstruktivis</p>	<p>- Jepang ingin dikenal sebagai sebuah Negara yang tidak hanya kuat dalam bidang ekonomi namun juga dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam politik internasional. Jepang turut serta dalam menciptakan sebuah perdamaian dunia. Jepang disini melakukan berbagai upaya dalam mengkonstruksi dirinya sebagai Negara bukan <i>Enemy States</i> di Tiongkok dan Korea Selatan.</p>
---	--	---	---

### 1.5 Kerangka Teori dan Konsep

Untuk menjelaskan mengenai keinginan Jepang dalam merubah konsep *Enemy State* dalam piagam PBB maka penulis menggunakan satu pendekatan atau teori, yaitu Konstruktivis.

#### 1.5.1 Konstruktivis

Konstruktivis merupakan ilmu baru yang muncul dalam hubungan internasional. Konstruktivis merupakan ilmu yang penting dalam sosiologi terutama dalam sosiologi konstitusional.<sup>21</sup> Konstruktivisme sendiri hadir dalam upayanya memperbaiki teori-teori yang sudah ada sebelumnya yakni, realisme dan neorealisme ataupun

<sup>21</sup> Christian Reus Schmidt, 2001, *Constructivism*, in: Scott Burchill, et all, *Theories of International Relations*, Palgrave, hal 194 diakses dalam [https://xa.yimg.com/kq/groups/22143767/566099877/name/%5BScott\\_Burchill,\\_Matthew\\_Paterson,\\_Christian\\_Reus-\(BookFi.org\).pdf](https://xa.yimg.com/kq/groups/22143767/566099877/name/%5BScott_Burchill,_Matthew_Paterson,_Christian_Reus-(BookFi.org).pdf) (18/4/2017, 23:00 WIB)

liberalisme dan neoliberalisme yang mana tidak mampu menjelaskan mengenai faktor penyebab berakhirnya perang dingin.

Konstruktivis memandang dunia sosial bahwa dunia sosial bukan merupakan sesuatu yang *given*, yang mana hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang dikatakan oleh behavioralis dan positivis. Dunia sosial merupakan wilayah inter-subjektif dimana dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya serta sekaligus yang memahaminya. Dunia sosial dibuat maupun dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.<sup>22</sup>

Anarki juga tidak selalu didefinisikan sebagai hal-hal yang bersifat konfliktual dan juga kooperatif. Tidak ada sifat yang sebenarnya dari anarki internasional. Anarki adalah apa yang diperbuat oleh negara. Jika negara berperilaku secara konfliktual satu sama lain, maka akan terlihat sifat dari anarki internasional adalah konfliktual. Namun, jika negara berperilaku kooperatif satu sama lain, maka akan terlihat sifat dari anarki internasional adalah kooperatif.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, dalam konstruktivis tentunya terdapat asumsi.

---

<sup>22</sup> Robert & Jackson Sorensen, 1999, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 307

<sup>23</sup> Cynthia Weber, 2014, *International Relations Theory, A Critical Introduction*, Third Edition, New York: Routledge, hal. 62

Asumsi *pertama*, pemusatan perhatian kesadaran manusia dan juga peranannya dalam hubungan internasional. Dalam konstruktivisme dapat dikatakan bahwasannya masyarakat terdiri dari individu-individu dan memiliki peranannya masing-masing dalam bertindak. Bagi konstruktivis, kepentingan dan juga identitas ditentukan oleh tindakan tersebut. Karena hal tersebutlah dapat dikatakan bahwasannya tindakan merupakan hal yang penting dan menentukan.

Asumsi *kedua*, anarki bagi konstruktivisme tidak dapat dipisahkan dalam sebuah interaksi sosial yang mana dapat diartikan bagaimana aktor-aktor internasional memaknai interaksi yang ada di antara mereka. Bagi konstruktivis dapat dikatakan hubungan yang terjadi bukan merupakan konsekuensi logis dari anarki namun ditentukan oleh bagaimana intersubjektivitas dari aktor.<sup>24</sup>

Asumsi *Ketiga*, kekuasaan seringkali dianggap bersumber dari kapabilitas material (*hard power*). Namun, lain halnya bagi konstruktivis yang menganggap kekuasaan muncul dari sebuah gagasan. Pemahaman mengenai kekuasaan bagi konstruktivis dilihat dari konteks interaksi sosial yang ada. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan pemahaman mengenai suatu kondisi yang menentukan pola interaksi. Oleh karena itulah dalam konstruktivis selain memahami

---

<sup>24</sup> Mohamad Rosyidin, 2015, *The Power of Ideas*, Sleman: Tiara Wacana, hal. 20

kondisi suatu fenomena namun sekaligus merekonstruksi cara pandang terhadap sebuah realitas, kepentingan dan juga identitas mereka.

Asumsi *Keempat*, kepentingan dipandang sebagai sebuah hal yang mendasari dari sebuah *action* dan identitas. Norma juga merupakan hal terpenting dalam perilaku masyarakat. Sebagaimana contoh dalam kebijakan luar negeri, bukan hanya masalah kepentingan nasional, tetapi juga menyangkut mengenai perilaku yang dapat diterima di masyarakat internasional. Sebuah kepentingan dapat dikatakan akan selalu fluktuatif mengingat penginterpretasian dan juga reinterpretasi akan selalu berbeda-beda dan berkembang dalam sebuah proses interaksi.

Asumsi *Kelima* yakni mengenai aktor. Pandangan konstruktivis mengenai negara selaku aktor bukan hanya sebagai aktor yang akan selalu mementingkan dirinya sendiri ketika dalam *decision making*. Negara cenderung akan berperilaku sesuai norma dan aturan yang mana hal ini dilandasi oleh keinginan sebuah negara dipandang baik oleh negara lain. Pertimbangan baik ataupun buruk dan juga pantas atau tidak pantas lebih dianggap penting bagi kaum konstruktivis dibandingkan pertimbangan mengenai untung dan juga rugi.

Asumsi *keenam* yaitu mengenai hubungan agen dan juga struktur. Konstruktivis menganalisis lembaga dengan berfokus khusus pada proses institusionalisasi, yaitu pengembangan dari pola praktik

dan sosialisasi serta penerapan norma-norma dan pola perilaku aktor-aktor baru dalam sebuah lembaga. Sebagaimana contoh adalah integrasi Eropa, konstruktivis tertarik dalam pengembangan integrasi lebih lanjut tidak hanya dalam arti formal tetapi juga melalui pembentukan rutinitas antara para pejabat di Komisi Eropa atau di Kementerian Nasional dalam praktik sehari-harinya, selain itu, konstruktivis tertarik untuk mencari tahu sejauh mana negara-negara anggota baru tersosialisasikan ke dalam lembaga yang ada dari Uni Eropa, atau mencari tahu apa dan bagaimana Uni Eropa mengubah aktor negara-negara tersebut. Mengingat hal itulah, kaum konstruktivis beranggapan bahwasannya struktur dan juga agen (unit) merupakan dua hal yang saling membentuk,

Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya hal yang terpenting dalam memahami konstruktivisme adalah mengenai identitas, *action* dan juga kepentingan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konstruktivis mengenai identitas. Konstruktivisme menganggap identitas sebagai sebuah variabel independen atau faktor yang menjelaskan mengenai tindakan suatu negara. Namun, disisi lain identitas juga dapat diperlakukan sebagai sebuah variabel dependen karena dapat dikatakan identitas merupakan hal yang dapat terkonstruksi secara sosial. Melihat hal-hal tersebut maka

konstruktivisme mempertanyakan mengenai bagaimana suatu identitas itu terbentuk.

Konsep mengenai identitas dapat dipahami melalui dua makna. Pemaknaan pertama yakni identitas sebagai kategori sosial yang mana atribut dan juga karakteristik yang membedakannya dengan yang lain.<sup>25</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa identitas terkonstruksi terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Sebagaimana contoh dari kategori ini adalah identitas sebagai sebuah negara demokratis.

Pemaknaan kedua yakni identitas sebagai kategori personal yakni atribut dan juga karakteristik yang melekat dalam diri seorang aktor dan kemunculan dari identitas tanpa perlu proses pembedaan dari yang lain.<sup>26</sup> Dapat dikatakan bahwa identitas kategori personal ini memandang seorang aktor berbeda dengan yang lain dan dapat dikatakan bahwa aktor memiliki keunikan yang tentunya berbeda dengan aktor lainnya. Aktor dapat melakukan tindakan atas dasar kehendak dan tujuannya sendiri tanpa melihat posisi dan kedudukannya dalam konteks sosial. Sebagaimana contoh dari kategori ini adalah etnis, agama, budaya dan sebagainya.

Dapat disimpulkan dari kedua kategori tersebut, konstruktivisme melihat identitas sebagai atribut yang melandasi

---

<sup>25</sup> Rosyidin, *Op. Cit*, hal. 46

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 47

bagaimana seharusnya melakukan sebuah *action*. Tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor menjadi bermakna karena seorang aktor mengerti dan juga memahami dirinya sendiri dan juga bagaimana situasi internasional. Bagaimana seorang aktor melakukan sebuah *action* didasarkan pada kepentingan yang ingin dicapai. Sehingga dapat dikatakan suatu identitas dapat membentuk sebuah kepentingan, kepentingan yang telah dibentuk melandasi hal apa yang harus dilakukan oleh seorang aktor.

Menurut Alexander Wendt dalam buku *the power of ideas* terdapat empat jenis identitas dalam hubungan internasional, yakni identitas personal, identitas yang menggolongkan negara ke dalam kategori tertentu, identitas peran (*role identity*), identitas kolektif (*collective identity*).<sup>27</sup> Identitas personal dapat dikatakan merupakan sebuah atribut yang membentuk eksistensi suatu negara yang membedakannya dengan negara lain (keunikan). Identitas personal suatu negara muncul dari kesadaran sebuah negara sebagai individu. Sebagaimana contohnya yakni keinginan untuk diakui dan dihormati oleh negara lain, keinginan menjadi sebuah negara yang sejahtera. Dari identitas personal dapat melahirkan empat kepentingan yang mana

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 50

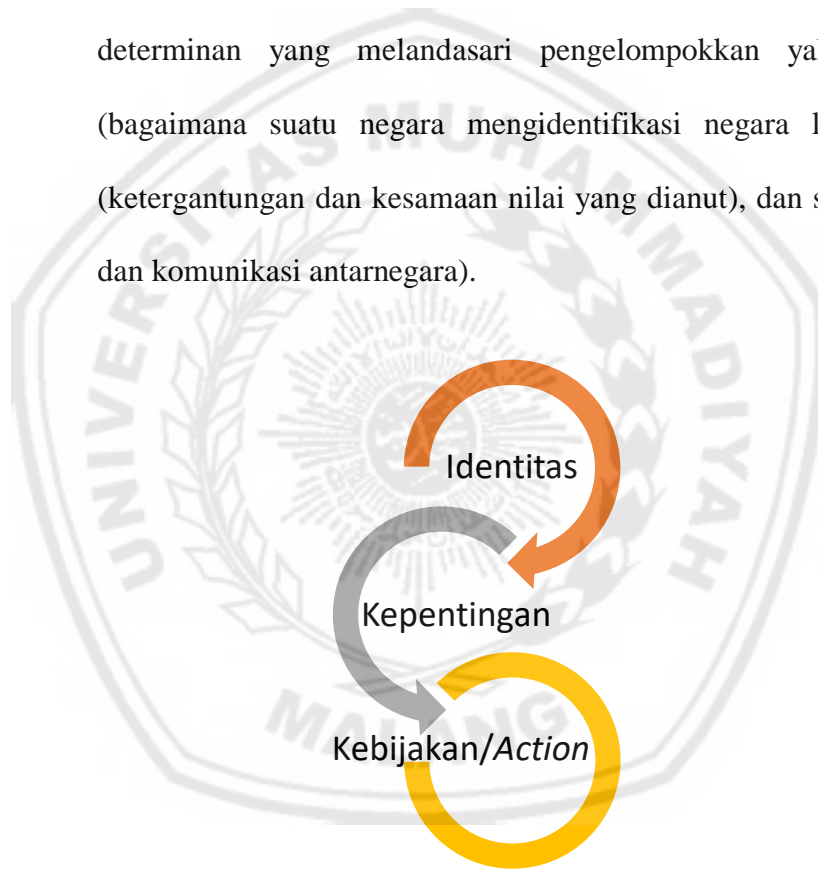


terdiri dari kedaulatan, otonomi, kesejahteraan dan juga mengenai harga diri.

Mengenai identitas yang menggolongkan negara ke dalam kategori tertentu, menurut Wendt seringkali identitas ini disebut juga dengan *type identity*. Sebagaimana contoh mengenai identitas ini yakni pengklasifikasian negara menjadi sebuah ‘negara fasis’, negara ‘sosialis’.

Identitas peran ini mengenai pandangan dan juga kedudukan aktor dalam hubungan internasional sehingga dapat dikatakan bahwa identitas ini berkaitan dengan tanggungjawab suatu negara jika dihadapkan dalam suatu kondisi tertentu. Untuk dapat mengetahui apa tanggungjawab yang harus dilakukan tentunya suatu negara memerlukan keberadaan dari negara lain sebagai pembanding ataupun sebagai lawan dari posisi dan tanggungjawab yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebagaimana contoh dalam hal ini adalah peran Amerika Serikat sebagai tentara salib yang mana kepentingan dari Amerika Serikat adalah melakukan penyebaran nilai yang dianutnya ke seluruh dunia. Hal ini tercermin dari kebijakan *regime change* yang Amerika anut untuk melengserkan pemerintahan yang dianggap tidak demokratis dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dilihat dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya identitas peran cenderung dalam membuat kebijakan yang berorientasi internasionalis. Sedangkan

identitas kolektif berlandaskan dari perasaan solidaritas. Wendt mengatakan bahwasannya terdapat faktor-faktor yang dapat membentuk identitas kolektif antarnegara yang mana terdiri dari interdependensi, keyakinan bersama, homogenitas, pengekangan diri.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibagi menjadi tiga faktor determinan yang melandasi pengelompokan yakni struktural (bagaimana suatu negara mengidentifikasi negara lain), sistemik (ketergantungan dan kesamaan nilai yang dianut), dan strategis (sikap dan komunikasi antarnegara).



Berdasarkan skema tersebut, dapat dikatakan identitas yang dimaksud disini yakni Jepang yang memiliki identitas sebagai sebuah negara yang dianggap sebagai *Enemy State*. Identitas sebagai sebuah

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 58

*Enemy State* ini kemudian melahirkan sebuah kepentingan yang mana Jepang ingin mengkonstruksi dirinya bahwa Jepang bukan *Enemy State* yang mana upaya ini dituangkan melalui *action* seperti pemberian bantuan dana beasiswa pendidikan melalui *Japan Foundation*, pertukaran budaya, mengubah departemen pertahanan menjadi kementerian pertahanan, dan sebagainya.

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan identitas personal yang mana suatu negara memiliki keunikan yang membedakan dengan negara lainnya. Melihat bagaimana Jepang menempatkan kepentingannya dalam dunia internasional. Interaksi internasional yang dipengaruhi oleh apa yang dimiliki oleh suatu negara seperti pengkategorian Jepang sebagai 'negara fasis'. Ketidakmampuan Jepang dalam menggunakan kemampuan militer diakibatkan oleh kekalahan Jepang saat Perang Dunia II menimbulkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Identitas Jepang yang diterima Jepang sebagai negara fasis tidak lain dikarenakan faktor sejarah masa lalu Jepang itu sendiri. Sejarah masa lalu Jepang yang kuat dalam bidang militernya hingga mampu melakukan ekspansi ke berbagai negara tetangga mengakibatkan banyak munculnya *stigma* bahwa penggunaan militer yang terlalu kuat dan berlebihan bukan hal yang baik dan tentunya dapat menimbulkan rasa trauma bagi negara yang telah terekspansi.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

#### **1.6.1.1 Jenis Penelitian**

Menurut W. Gulo, penelitian eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertitik tolak pada pertanyaan mengapa. Nantinya isi penelitian ini akan menjelaskan mengenai alasan terjadinya suatu fenomena tertentu, penelitian jenis ini biasanya mempunyai banyak variabel terkait dengan kasus penelitian yang kita bahas.<sup>29</sup>

#### **1.6.1.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang penulis dapatkan bukan berbentuk *numeric*. Penulis menulis dan menjelaskan data yang berhasil didapatkan yang mana kemudian penulis berusaha sebaik mungkin dalam menyajikan hasil penelitian tersebut.

#### **1.6.1.3 Tingkat Analisa**

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah induksionis.<sup>30</sup> Disebut induksionis karena unit eksplanasi yakni sistem yaitu *image* Jepang sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan tingkatnya lebih tinggi daripada unit

---

<sup>29</sup> W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, Hal. 19

<sup>30</sup> Mochtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 42

analisisnya yakni negara yaitu konstruksi *image* Jepang sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan.

#### **1.6.1.4 Variabel Penelitian**

Untuk mempermudah sebuah penelitian eksplanatif, maka penulis menempatkan unit eksplanasi dan unit analisis pada posisinya masing-masing. Unit analisis dalam penelitian ini adalah konstruksi *image* Jepang sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan, sedangkan unit eksplanasinya adalah *image* Jepang sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan. Unit analisis disini selanjutnya disebut variabel dependen dan unit eksplanasi disini selanjutnya disebut variabel independen.

#### **1.6.1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **a. Batasan Waktu**

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya keteraturan permasalahan yang akan dibahas. Oleh sebab itu, diperlukan adanya batasan waktu penelitian untuk membatasi ruang lingkup masalah agar tidak meluas serta memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Adapun batasan waktu dalam penelitian ini adalah pada era PM Shinzo Abe menjabat pada September 2006—September 2007 dan pada Desember 2012-2017.

## **b. Batasan Materi**

Ruang lingkup penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan dan mempermudah permasalahan yang dibahas sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah dengan memfokuskan kajian yang akan ditekankan pada upaya Jepang mengkonstruksi dirinya sebagai negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan karena kedua negara ini merupakan negara bekas kolonisasi oleh Jepang dan memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi terhadap Jepang.

### **1.6.1.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Layaknya penelitian pada umumnya, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang penulis peroleh dari *library research* yang berasal dari buku, jurnal *online* maupun *offline*, website resmi dan sumber pustaka akurat lainnya<sup>31</sup>.

## **1.7 Hipotesa**

Terdapat beberapa alasan mengapa Jepang ingin mengkonstruksi dirinya sebagai negara bukan *Enemy States* di Tiongkok dan Korea Selatan. Pertama, Jepang telah mendapatkan status sebagai *Enemy States* sejak Perang

---

<sup>31</sup> Menurut Nazir, *library research* merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mana dilakukan dengan cara penelaahan terhadap sumber-sumber yang terdiri dari buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dikutip dalam M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,. Hal. 27

Dunia II berakhir tentunya ini mempengaruhi kehidupan Jepang dalam mempertahankan legitimasinya. Kedua, Jepang ingin dianggap sebagai sebuah negara yang normal dimana Jepang ingin menunjukkan bahwasannya Jepang tidak seburuk ketika Jepang masih kuat dalam bidang militernya untuk melakukan sebuah ekspansi. Dengan menjadi sebuah negara yang normal, Jepang nantinya dapat turut serta aktif dalam dunia perpolitikan internasional dan juga turut serta dalam menjaga perdamaian internasional. Ketiga, kebangkitan Tiongkok terutama mengenai konflik Kepulauan Senkaku di Laut Tiongkok Timur yang mana Jepang beranggapan bahwa identitasnya sebagai negara pasifis tidak dapat menjawab bagaimana keamanan di kawasan. Keempat, kecemasan Jepang atas kegiatan militer Korea Utara (Taepodong 1) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Jepang. Kelima, Amerika Serikat yang ingin mengurangi kehadiran militernya di wilayah Asia Timur. Jepang merasa terancam jika Amerika Serikat menarik tentara militernya karena keamanan Jepang dalam militernya mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat.

Berdasarkan analisis guna mengetahui hal-hal apa saja yang membuat Jepang berusaha untuk mengkonstruksi dirinya, jika permasalahan identitas Jepang sebagai *Enemy States* dan dihubungkan teori konstruktivisme yang diungkapkan oleh Alexander Wendt mengenai identitas dapat dikatakan Jepang yang memiliki identitas sebagai sebuah negara pasifis yang mana identitasnya sebagai sebuah negara pasifis ini mendorongnya memiliki sebuah kepentingan untuk menghapuskan status *Enemy State* yang sudah lama

disandangnya. Kepentingan yang dimiliki oleh Jepang yakni penghapusan status *Enemy State* membuat Jepang memilih untuk mengkonstruksi dirinya dan menunjukkan pada dunia bahwa Jepang merupakan negara yang normal yang mana Jepang merupakan negara yang cinta damai dan akan turut serta aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

#### 1.2 Rumusan Masalah

#### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1.3.1 Tujuan Penelitian

##### 1.3.2 Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Akademis

###### b. Manfaat Praktis

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

#### 1.5 Kerangka Teori dan Konsep

##### 1.5.1 Konstruktivis

#### 1.6 Metodologi Penelitian

##### 1.6.1 Metode Penelitian

###### 1.6.1.1 Jenis Penelitian

###### 1.6.1.2 Metode Analisis

###### 1.6.1.3 Tingkat Analisa



1.6.1.4 Variabel Penelitian

1.6.1.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

b. Batasan Materi

1.6.1.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1.7 Hipotesa

1.8 Sistematika Penulisan

**BAB 2 JEPANG SEBAGAI *ENEMY STATE***

2.1 Ekspansi Jepang di Asia pada Perang Dunia II

2.1.1 Perang Jepang-Tiongkok 1894-1895

2.1.2 Perang Jepang di Sekutu

2.1.3 Kolonialisme Jepang di Asia

2.3 Jepang sebagai Negara Pasifis

2.4 Pandangan Negara Bekas Jajahan Jepang

2.5 Pandangan Jepang sebagai *Enemy State*

**BAB 3 JEPANG SEBAGAI NEGARA BUKAN *ENEMY STATE***

3.1 Kepentingan Jepang Mengkonstruksi *Image* Jepang

3.2 Upaya Jepang Mengkonstruksi *Image* Jepang

3.2.1 *Hard Power*

3.2.1.1 Revisi Artikel 9

3.2.1.2 Proaktif Pasifisme

3.2.2 *Soft Power*

### 3.2.2.1 *Official Development Assistance* (ODA)

#### 3.2.2.1.1 *Official Development Assistance* (ODA) di Tiongkok

#### 3.2.2.1.2 *Official Development Assistance* (ODA) di Korea Selatan

### 3.2.2.2 Japan *Foundation* (JF)

#### 3.2.2.2.1 Japan *Foundation* (JF) di Tiongkok

#### 3.2.2.2.2 Japan *Foundation* (JF) di Korea Selatan

### 3.2.2.3 *Abenomic*

#### 3.2.2.3.1 *Abenomic* di Tiongkok

#### 3.2.2.3.2 *Abenomic* di Korea Selatan

### 3.3 Konstruksi *Image* Jepang sebagai Negara bukan *Enemy State* di Tiongkok dan Korea Selatan

## **BAB 4 PENUTUP**

### 4.1 Kesimpulan

### 4.2 Saran